

## Penggunaan Informasi Anggaran dan Keuangan oleh Politisi di Parlemen

Yelia Findy Tiara<sup>1\*</sup>, Deviani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

\*Korespondensi: [tiarayeliaindy@gmail.com](mailto:tiarayeliaindy@gmail.com)

---

**Tanggal Masuk:**

17 Maret 2024

**Tanggal Revisi:**

03 April 2024

**Tanggal Diterima:**

30 April 2024

---

**Keywords:** Budget;  
Financial Information;  
Politicians; Parliament.

---

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Tiara, Y. F. & Deviani (2024).  
Penggunaan Informasi Anggaran dan  
Keuangan oleh Politisi di Parlemen.  
*Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6  
(2), 667-680.

---

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1585>

---

**Abstract**

*This research aims to find out how budget and financial information is used by politicians in parliament (case study of the Regional People's Representative Council (DPRD) Agam District). This research is qualitative research using a descriptive approach. This research emphasizes processes and meanings that are not measured but places more emphasis on the socially constructed nature of reality, the close relationship between the researcher and the subject and forming an investigation that contains value. Researchers for this research collected data through interviews with members of the Agam Regency DPRD. The results of this research state that budget and financial information is really needed, but Agam District DPRD members have not been able to use these reports optimally. There is still little research on the use of budget and financial information by members of the Regional People's Representative Council (DPRD). And the researchers conducted research in the Agam Regency area, where in this area the research carried out by the researchers was something new. This research has a contribution in that, based on the research results, it can improve the work patterns or composition of DPRD members in the budget sector, so that it can create a better budget.*



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

---

### PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditempatkan dalam

posisi yang sangat strategis dan penting, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 149 ayat (1) menyebutkan bahwa DPRD sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tiga fungsi umum yaitu (1) fungsi legislasi (Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati.), (2) fungsi anggaran (Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati), dan (3) fungsi pengawasan (Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah).

DPRD dalam melaksanakan salah satu fungsi umumnya yaitu fungsi anggaran dengan mempertimbangkan dan menyusun kebijakan fiskal, dalam proses anggaran, dan sampai pada penyelenggaraan akuntansi di pemerintah sangatlah penting. Peran itu menyangkut kapabilitas analitis yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terutama di bidang penganggaran dan sistem informasi akuntansi. Tidak adanya latar belakang dibidang akuntansi akan menyebabkan ketidakmampuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan analisa pelaporan anggaran dan keuangan atau ketidak mampuan dalam memahami laporan anggaran dan keuangan, yang digunakan dalam upaya untuk mengelola pemerintahan yang lebih efektif.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tupoksi yang mencakup berbagai aspek terkait pengawasan anggaran. Mereka memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, termasuk penilaian terhadap pencapaian program, penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran dan dapat melakukan tindakan atau rekomendasi yang diperlukan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas informasi anggaran dan keuangan (Haryati,2016).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membutuhkan berbagai informasi anggaran dan keuangan. Berikut adalah beberapa informasi yang umumnya dibutuhkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi anggaran yaitu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), penjelasan dan justifikasi anggaran, rencana kerja pemerintah daerah, laporan pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja program dan proyek, laporan keuangan pemerintah daerah, dan informasi tambahan lainnya. Informasi anggaran memiliki peranan yang sangat penting bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya. Informasi anggaran memberikan dasar yang kuat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana publik di daerah. Alasan mengapa informasi anggaran sangat penting bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Haryati, 2016).

Pertama, informasi anggaran memungkinkan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan memperoleh dokumen seperti RAPBD, laporan pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan, DPRD dapat memeriksa secara teliti dan memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efisien, sesuai dengan peraturan, serta dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Informasi ini menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dan mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidakberesan yang mungkin terjadi.

Kedua, informasi anggaran membantu DPRD dalam menilai dan memprioritaskan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Dengan mempelajari RAPBD

dan penjelasan anggaran yang menyertainya, DPRD dapat memahami tujuan, sasaran, dan manfaat yang diharapkan dari setiap program atau kegiatan yang diajukan. Informasi ini memungkinkan DPRD untuk melakukan penilaian obyektif terhadap urgensi dan kebutuhan masyarakat terkait alokasi anggaran. Ketiga, informasi anggaran memberikan dasar bagi DPRD dalam berperan sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dengan memahami alokasi anggaran, DPRD dapat mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, mengevaluasi sejauh mana program dan kebijakan pemerintah daerah dapat memenuhi harapan masyarakat, serta memastikan bahwa prioritas pembang unan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat tercermin dalam alokasi anggaran.

Keempat, informasi anggaran juga penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kondisi keuangan daerah. Laporan keuangan, termasuk neraca, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, memberikan gambaran yang jelas tentang sumber pendapatan, pengeluaran, dan kesehatan keuangan pemerintah daerah. Informasi ini memungkinkan DPRD untuk mengidentifikasi masalah keuangan yang perlu ditangani dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Sebagai perwakilan warga negara, dan seringkali pembuat keputusan utama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan menjadi pengguna informasi anggaran dan keuangan di pemerintah (Giacomini et al., 2016). Namun, kenyataan di beberapa yurisdiksi tampaknya menunjukkan bahwa anggota DPRD tidak tertarik menggunakan jenis informasi anggaran dan keuangan untuk aktivitas mereka (Liguori et al., 2012; Van Helden, 2016). Baru-baru ini, perdebatan dalam literatur akademik tentang akuntansi sektor publik telah membahas isu-isu terkait tentang apakah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan informasi akuntansi, jika benar dapat dilihat informasi akuntansi (anggaran berbasis kas dan keuangan berbasis akrual) mana yang mereka gunakan, dan apakah mereka menggunakan akuntansi sebagai alat/sumber informasi untuk kegiatan mereka.

Penelitian tentang penggunaan informasi anggaran dan keuangan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih sedikit. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Buylen dan Christiaens (2015) tentang anggota dewan local femish, menunjukan bahwa informasi anggaran dan keuangan masih jarang digunakan dalam debat anggaran. Para peneliti percaya bahwa hal ini disebabkan oleh penggunaan informasi kinerja akan lebih ekonomis, sedangkan penggunaan informasi anggaran dan keuangan lebih mudah diperhitungkan dalam penilaian politik. Beberapa literatur menunjukkan bahwa politisi tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menggunakan informasi anggaran dan keuangan yang sangat teknis dan kompleks. Akibatnya, anggota DPRD tidak terlalu menghiraukan informasi anggaran dan keuangan untuk aktivitas politik (Olson dan Shalin-Andersson, 1998; Guthrie et al., 1999; Ezzamel et al., 2005; Liguori et al., 2012). Di sisi lain, para peneliti gagal memahami topik informasi keuangan mana yang penting bagi anggota DPRD. Maka dari itu peneliti menanyakan kepada anggota DPRD jenis informasi apa yang mereka inginkan, butuhkan, pilih atau hindari untuk kegiatan mereka (Askim, 2015).

Literatur lain mengungkapkan bahwa sejumlah besar informasi anggaran dan keuangan disiapkan, tetapi kurangnya keahlian anggota DPRD dalam pengambil keputusan yang diperlukan (Eppler dan Mengis, 2004). Hal ini menunjukkan perlunya informasi yang disederhanakan, dirangkum dan transparan, yang dapat disiapkan oleh “perantara”, “broker” atau “penasihat” (Rutherford, 1992; Heald, 2003; Fung, 2013).

Literatur yang disebutkan di atas mengungkapkan bahwa anggota DPRD kurang memiliki keterampilan dalam memahami informasi akuntansi dan tidak ada tujuan yang jelas apakah dan bagaimana mereka menggunakannya, terutama anggota DPRD dalam menjalankan peran dan tugas mereka sebagai perwakilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat secara umum penggunaan informasi anggaran dan keuangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Agam.

Peneliti akan meneliti khususnya, apakah anggota DPRD memahami dan menganggap informasi anggaran dan keuangan penting dan berguna, jenis informasi anggaran dan keuangan apa yang mereka gunakan dan juga beserta tujuan dari informasi tersebut. Dan melihat apakah anggota DPRD menggunakan tenaga ahli dalam menyiapkan informasi anggaran dan keuangan yang mereka butuhkan.

Adapun pemilihan lokasi penelitian di DPRD Kab. Agam diambil dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) Tidak semua anggota DPRD bagian anggaran kab Agam memiliki latar belakang lulusan ekonomi dan keuangan. 2) Untuk saat ini, DPRD menjadi sorotan publik baik yang menyangkut kinerjanya maupun anggarannya, sehingga menarik untuk diteliti. 3) sebagai baseline untuk menilai atau mengetahui kualitas anggota dewan periode saat ini mengenai penggunaan informasi anggaran dan keuangan. 4) belum ada riset mengenai keuangan terhadap dewan terutama di DPRD kab Agam.

## **REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Teori Agency (Agensi Teori)**

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi menjelaskan adanya interaksi antara agen sebagai pihak yang menerima perintah sedangkan principal sebagai pihak pemberi perintah, pengawas dan memberikan arahan kepada agen atas tugas yang sedang dijalankan oleh agen. Menurut pandangan Eisenhardt (1989) yang menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) mempunyai daya pikir terbatas terkait pandangan terhadap masa depan (bounded rationality), dan (3) selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan pada asumsi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manusia selaku agen memiliki sifat yang opportunistic atau lebih mengutamakan kepentingan pribadi (Haris, 2004). Namun hubungan agen dengan principal pada sektor pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasari pada peraturan-peraturan berlaku. Hal tersebut untuk mengurangi perilaku oportunistik antara agen dan prinsipal.

### **Penggunaan Informasi Anggaran**

Anggaran merupakan perencanaan manajerial dalam melakukan suatu kegiatan dalam hal-hal keuangan. Anggaran merupakan istilah dari perencanaan laba yang selaras dan termasuk pilihan-pilihan manajemen dan tujuan terhadap organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu rujukan dalam melaksanakan operasional sehari-hari (Setiawan & Soleh, 2021).

Anggaran merupakan kegiatan yang direncanakan secara sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan dan diungkapkan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk waktu tertentu dimasa yang akan datang (Gunawan & Ishak, 2021). Anggaran (budget) yaitu program tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi dan dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa (Baene & Waruwu, 2019).

### **Penggunaan Informasi Keuangan.**

Laporan keuangan daerah bertujuan memberi informasi keuangan yang nantinya berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik dan laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain itu, hal yang lebih penting dari laporan keuangan yaitu kepuasan orang dalam penggunaan informasi keuangan (Satria & Bobby, 2018). Berdasarkan Deniski (1973) yang dikutip dalam (Satria & Bobby, 2018), biasa dikenal Impossibility Theory yaitu penggunaan jenis informasi lapotran keuangan memiliki kepentingan yang bermacam-macam. Maka dari itu tidak mudah dalam menyiapkan semua laporan keuangan yang bisa memuaskan

pengguna dalam pengambilan informasi keuangan.

Tujuan umum dari akuntansi dan laporan keuangan yaitu, sebagai berikut: (Defitri, 2018):

- a. Memberi semua informasi yang terkait atau yang digunakan untuk membuat sebuah keputusan baik itu keputusan ekonomi, keputusan social, keputusan politik, dan juga menjadi bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
- b. Menyediakan semua informasi yang akan digunakan untuk melihat atau mengevaluasi kinerja manajerial dan kinerja organisasional

### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis dan penting, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 149 ayat (1) menyebutkan bahwa DPRD sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi fungsi legislasi, diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Fungsi anggaran menjadi fungsi penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tanpa fungsi anggaran maka ada kemungkinan bahwa penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menjalankan fungsinya dengan baik

### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menekankan pada proses dan makna yang tidak diukur tetapi lebih menekankan pada sifat realita yang terbangun secara social, hubungan erat Antara peneliti dan subjeknya dan membentuk penyelidikan yang mengandung nilai. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara, dan dokumen lainnya. Tujuan dari penelitian ini menggambarkan fenomena yang terjadi dan mencocokkan Antara realita dan teori yang berlaku dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Deskriptif adalah menjelaskan atau gambaran fakta-fakta yang akurat serta hubungan Antara fenomena yang terjadi (Nazir,1998).

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini karena pendekatan kualitatif dapat dikembangkan dengan situasi yang akan peneliti hadapi. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang kompleks, dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat memiliki perspektif berbeda yang semuanya perlu dipertimbangkan. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya memahami bagaimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kab Agam menggunakan informasi anggaran dan keuangan untuk kegiatan mereka. Objek penelitian ini ditujukan untuk penggunaan informasi anggaran dan keuangan oleh politisi di parlemen dengan studi kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Lubuk Basung.

### **Metode Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman (1984), menyatakan bahwa aktivitas pada analisis data kualitatif berlangsung secara terus menerus sampe tuntas atau secara signifikan, sehingga nantinya data yang diperoleh bersifat jenuh . Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak

diperolehnya lagi data atau informasi baru. Miles dan Huberman menyatakan bahwa: “data kualitatif bersifat membumi, kaya akan deskripsi dan mampu menjelaskan tentang proses. Agar data itu memberi makna maka dalam analisis yang dilakukan ditempuh langkah-langkah: 1) reduksi data; 2) display data; dan 3) kesimpulan dan verifikasi. This research uses an experimental method (quasi-experimental).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Temuan Penelitian**

#### **Umur anggota DPRD Kabupaten Agam**

Umur anggota DPRD adalah usia rata-rata anggota DPRD yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Umur dewan sangat penting dalam menentukan kinerja seseorang. Anggota DPRD Kabupaten Agam yang lebih muda cenderung mempunyai keinginan untuk lebih dalam memahami informasi anggaran dan keuangan sehingga mereka meminta laporan keuangan yang lebih kompleks dan rinci lagi. Sedangkan Anggota DPRD Kabupaten Agam yang lebih tua lebih cenderung malas membaca informasi anggaran dan keuangan karena menurut mereka terlalu tebal dan meminta untuk menyederhanakan laporan informasi anggaran dan keuangan tersebut.

Anggota dewan yang lebih tua cenderung mempunyai pengalaman, sumberdaya ekonomi, dan wisdom yang lebih tinggi. Dengan pengalaman, sumberdaya ekonomi yang tinggi mungkin akan berdampak terhadap kinerja pemerintahan daerah. Sehingga dengan bantuan tenaga ahli atau perantara dalam memahami isi laporan informasi anggaran dan keuangan anggota dewan yang lebih tua dapat mengambil keputusan atau kebijakan dengan baik.

“format informasi anggaran dan keuangan sekarang sangat tebal dan banyak tersebut membuat kami mengalami kesusahan dalam menggunakan dan memahaminya apalagi anggota dewan bagian anggaran sudah banyak yang berumur lanjut serta tidak memiliki banyak waktu untuk membaca dan memahami informasi anggaran dan keuangan tersebut jadi kami maunya yang sederhana”

“format yang sederhana, saat ini buku anggaran itu tebal, ribuan halaman jadinya yang dilihat nanti Cuma totalan nya saja, kalau dibawa buku yang tebal pas rapat susah bolak baliknya susah melihatnya, kalau filenya dihp filenya besar, tetapi kalau memang itu sesuai dengan peraturan ya sudah tidak apa apa, karna itu sudah disatukan semua anggaran opd, anggaran politik, kesehatan, pendidikan, anggaran kegiatan masyarakat, kecamatan dan desa , kalau bisa disederhanakan lagi mengingat waktu juga biar efisien dan efektif”

“menggunakan informasi yang ada di anggaran dan keuangan saya selalu melihat semua rinciannya semua bagian bagian kecil untuk apa uang itu digunakan apa manfaatnya apakah sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang diterima”

“format yang kompleks yang semuanya mencakup didalamnya, beserta rincian rincian kecilnya juga biar jelas anggaran itu dikeluarkan untuk kegiatan apa saja untuk membeli apa saja”

#### **Latar belakang Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Agam**

Latar belakang pendidikan anggota dewan legislatif daerah merupakan atribut penting bagi DPRD. Dalam rapat-rapat (seperti, rapat kerja atau raker) DPRD dengan partnernya (eksekutif), anggota DPRD memerlukan pengetahuan dan kemampuan yang memadai agar terjadi komunikasi dua arah antara anggota DPRD dan partnernya, namun latar belakang anggota DPRD Kabupaten Agam dalam bidang anggaran sebagian besar bukan dari lulusan akuntansi maupun ekonomi. Hal ini membuat sebagian besar anggota DPRD mengalami kesulitan dalam melakukan analisa informasi anggaran dan keuangan untuk mengambil

kebijakan sehingga sangat dibutuhkannya perantara atau tenaga ahli dalam hal ini. Bagi anggota DPRD yang memiliki latar belakang Pendidikan ekonomi atau akuntansi, hal ini tidak menjadi masalah dan lebih cenderung menginginkan laporan informasi anggaran dan keuangan yang lebih kompleks dan rinci lagi.

“ karena bagian anggaran sendiri beragam latar belakang pendidikan bapak dan ibunya tidak semuanya memiliki latar belakang ekonomi dan keuangan yang membuat anggota DPRD kesulitan dalam menggunakan dan memahami informasi anggaran dan keuangan tersebut, tapi ada juga yang memiliki latar belakang ekonomi yang mungkin tidak membutuhkan tenaga ahli dalam membaca dan menggunakan informasi anggaran dan keuangan”

“rancangan anggaran dan keuangan ini kan disiapkan oleh sekretariat dprd bagian keuangan, maka tentu saja itu bisa disebut dengan tim ahli, tapi tim ahli pas diskusi atau rapat anggaran dan keuangan itu tidak ada, khusus dewan saja, atau mungkin sebelum rapat diadakan bapak ibu dewan ada yang berdiskusi dengan tim fraksi nya terlebih dahulu bisa saja ya, tapi saya pribadi tidak”

### **Pengalaman Kerja Anggota DPRD Kabupaten Agam**

Pengalaman kerja anggota DPRD merupakan hal yang juga dibutuhkan, hal ini dikarenakan pengalaman yang di miliki bisa menjadi gambaran dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa depan. Anggota DPRD Kabupaten Agam rata-rata memiliki pengalaman sudah dua periode sehingga seharusnya mereka sudah bisa mengambil kebijakan dengan baik dengan adanya evaluasi dari kebijakan sebelumnya dan evaluasi cara anggota DPRD tersebut dalam membaca, memahami dan menggunakan informasi anggaran dan keuangan untuk menciptakan anggaran ataupun kebijakan kedepannya.

“kalau pengalaman saya sudah dua periode dibagian anggaran dan periode yang sekarang saya diangkat menjadi wakil ketua dprd dan diletakkan juga di bagian anggaran, mungkin kalau untuk pengalaman saya sudah kenyang di bagian anggaran, tetapi kalau keahlian tentu saya dapatkan dari pengalaman, semakin lama kita berada dilingkungan tersebut maka semakin kita memahami dan mungkin hafal tentang semua bagian dilingkungan itu”

“saya sudah dua periode dibagian anggaran jadi kalau pengalaman udah bisa dikatakan matang dan keahlian karena sudah berpengalaman maka sudah ahli dalam bidang ini.”

“pengalaman saya sudah dua periode mungkin keahlian saya didapatkan lebih kurang dari 10 tahun pengalaman saya.”

### **Keterbukaan penggunaan informasi anggaran dan keuangan**

Transparansi dalam laporan informasi anggaran dan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dan sudah menjadi kebutuhan bagi Masyarakat dan di Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar tata pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah transparansi terhadap laporan informasi anggaran dan keuangan daerah.

Kabupaten Agam sendiri masi belum memiliki transparansi terhadap laporan informasi anggaran dan keuangan yang baik. Hal ini dijelaskan langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Agam saat peneliti melakukan wawancara. Kabupaten Agam belum memiliki transparansi karena web yang seharusnya dimiliki daerah Kabupaten Agam untuk mengupload laporan dan web yang seharusnya dapat digunakan Masyarakat untuk mengakses laporan informasi anggaran dan keuangan belum tersedia dan terkelola dengan baik, dan Masyarakat sendiri belum bisa mengakses web tersebut dikarenakan web tersebut belum terbuka untuk umum, hanya orang yang memiliki akses dan sandi saja, sehingga dapat

disimpulkan oleh peneliti bahwa Kabupaten Agam belum memenuhi komitmen transparansi dalam laporan informasi anggaran dan keuangannya.

“saya maunya semua masyarakat dapat memperoleh semua informasi anggaran di web nya kab agam ,agar informasi anggaran dan keuangan ini bersifat terbuka dan menjadi salah satu langkah kita agar tidak menyalahgunaan dana dan agar antara pemerintah dengan masyarakat terbuka, namun web kita saat ini hanya bisa di akses oleh orang-orang tertentu dan orang yang memiliki sandi saja”

### **Pemahaman dan kegunaan informasi anggaran dan keuangan bagi anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.**

Parlemen menjawab bahwa mereka memiliki pemahaman terhadap informasi anggaran dan keuangan serta menggunakan informasi anggaran dan keuangan tersebut.

“Karna bapak bagian anggaran tentu saja dituntut untuk paham dalam informasi anggaran dan keuangan karena laporan informasi anggaran dan keuangan merupakan sumber informasi bagi bapak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan anggara. Namun, pemahaman yang bapak miliki tentu saja masih terbatas karna bukan ahli dibidangnya”.

“Untuk pemahaman informasi anggaran dan keuangan secara garis besar tentu saja paham, namun untuk pemahaman mendalam tentu belum ada, karena mengingat saya bukan lulusan dari ekonomi sehingga untuk hal ini masi baru bagi saya”

“Untuk pemahaman sepertinya masi jauh dari kata paham ya, karna saya juga bukan lulusan akuntansi, biasanya saya menggunakan laporan informasi anggaran dan keuangan melihat secara umum saja, biasanya dari total-total saja.”

“kalau pemahaman bisa di bilang paham ya, tapi pemahaman saya tentu saja masi jauh jika dibandingkan dengan orang-orang yang lulusan ekonomi atau akuntansi yang memang mendalami ilmu tersebut. Kalau untuk penggunaan, tentu saja saya menggunakannya karna itu merupakan sumber utama saya”

Namun pemahaman dan penggunaan informasi anggaran dan keuanagan oleh anggota DPRD Kabupaten Agama ini masih terbatas atau tidak maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari informasi anggaran dan keuangan yang disebabkan oleh latar pendidikan dari anggota DPRD itu sendiri yang sebagian besar bukan dari lulusan ekonomi atau akuntansi dan untuk memulai belajar memahami informasi anggaran dan keuangan itu sendiri sangat susah dilakukan karena informasi keuangan dan anggaran yang ada itu relative tebal sehingga membuat anggota DPRD tersebut tidak tertarik untuk membaca dengan alasan keterbatasan waktu dan usia mereka yang sudah tidak muda lagi. Oleh karena itu, informasi anggaran dan keuangan bagi anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam belum dapat digunakan secara baik dan maksimal.

“Para anggota dewan bagian anggaran yang lain yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau keuangan, karena bagian anggaran sendiri beragam latar belakang pendidikan bapak dan ibunya tidak semuanya memiliki latar belakang ekonomi dan keuangan yang membuat anggota DPRD kesulitan dalam menggunakan dan memahami informasi anggaran dan keuanagn tersebut”

“format informasi anggaran dan keuangan sekarang sangat tebal dan banyak sehingga membuat kami mengalami kesusahan dalam menggunakan dan memahaminya apalagi anggota dewan bagian anggaran sudah banyak yang berumur lanjut serta tidak memiliki banyak waktu untuk membaca dan memahami informasi anggaran dan keuanagan tersebut”

“Saat ini buku anggaran itu tebal, ribuan halaman jadinya yang dilihat nanti Cuma totalan nya saja, kalau dibawa buku yang tebal pas rapat susah bolak baliknya susah melihatnya, kalau filenya dihp filenya besar”

Melalui hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa informasi anggaran dan keuangan tersebut digunakan dan dipahami oleh anggota DPRD, namun

pemahaman yang dimiliki anggota DPRD tersebut tidak banyak dan kegunaan informasi anggaran dan keuangan oleh DPRD masih belum maksimal.

### **Jenis dan sumber informasi anggaran dan keuangan yang digunakan anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Agam dalam debat parlemen**

Anggota DPRD Kabupaten Agam menjawab bahwa mereka menggunakan semua informasi yang mengenai anggaran dan keuangan, namun dalam hasil wawancara anggota parlemen juga menjelaskan bahwa dalam penggunaan informasi anggaran keuangan tidak dilihat secara detail, dengan kata lain anggota DPRD tidak melihat semua informasi anggaran dan keuangan yang ada dalam laporan, tapi mereka hanya melihat hasil akhir dari informasi anggaran dan keuangan tersebut. Hal ini dilakukan oleh anggota DPRD karena mereka tidak memiliki waktu yang banyak dalam membaca dan memahami informasi anggaran dan keuangan tersebut ditambah lagi mereka memiliki pekerjaan dan kegiatan lain.

“Semua informasi apapun yang mengenai anggaran dan keuangan, semua nya bapak butuhkan seperti APBD, SKPD. Didalam laporan tersebut terdapat anggaran biya, belanja pemerintah dan informasi lainnya.”

“tapi ada informasi anggaran dan keuangan yang tidak bapak gunakan, seperti rincian rincian yang kadang tidak terlalu bapak liat secara detail, bapak Cuma melihat total anggaran dan keuangan yang digunakan atau yang dibutuhkan saja tanpa melihat rinciannya satu persatu, hal itu dikarenakan kurangnya waktu dan banyak kegiatan lainnya yang harus dilakukan.”

Dalam menetapkan kebijakan anggaran, anggota DPRD melakukan tahapan seperti yang telah diatur dalam undang-undang dan telah sesuai dengan prosedur, namun dalam hasil wawancara yang peneliti tangkap, walaupun anggota DPRD telah melakukan proses yang sesuai dengan prosedur dalam menetapkan kebijakan, masih terdapat kekurangan yaitu dalam mengambil informasi yang ada pada laporan informasi anggaran dan keuangan, Hal ini dikarenakan kebiasaan anggota DPRD yang hanya melihat secara keseluruhan dan melihat bagian akhir atau total dari informasi anggaran dan keuangan tersebut.

“sebenarnya kalau ini sangat mudah jika semua instansi membuat anggaran dan laporan keuangan berdasarkan dengan kenyataan dan berdasarkan dengan kebutuhan para masing masing instansi. Banyak hal yang dilalui baru kami (anggota dewan bagian anggaran) dapat membuat kebijakan atau membuat keputusan setelah melihat anggaran dan keuangan yang diserahkan kepada kami, harus melakukan rapat dan berdiskusi melalui debat anggaran, meninjau kembali apakah ini sudah sesuai dengan yang sebenarnya dan anggaran keuangan ini harus berdasarkan peraturan yang dibuat oleh bupati, sebelum kami membuat kebijakan atau menandatangani anggaran dan keuangan memang perlu diskusi terlebih dahulu agar kami dapat mengambil keputusan yang memang memang terbaik dan tentunya harus sesuai dengan peraturan yang dibuat.”

“berdiskusi dengan semua tim anggaran, bamus, dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), melihat semua informasi anggaran yang bisa bermanfaat untuk membuat kebijakan, semua bagian anggaran nantinya akan mengeluarkan pendapatnya masing masing, baik itu banggar dprd, bamus, maupun tapd jika nanti semua informasi dirasa sudah pas dan cocok baru dari semua informasi anggaran dan keuangan yang didapat maka akan memperoleh kebijakan yang berlaku untuk satu tahun kedepan, karena anggaran ini dibuat untuk satu kedepan atau berlaku selama satu tahun, jadi informasi anggaran tahun ini digunakan untuk membuat kebijakan satu tahun, begitu seterusnya, bisa saja setiap tahunnya kebijakannya berubah ubah sesuai dengan informasi anggarannya, tetapi biasanya tidak banyak perubahan. Dan tentunya sudah ada peraturan yang mengatur tentang anggaran.”

“saya menggunakan informasi anggaran dan keuangan secara keseluruhan dengan melihat hasil akhir atau total dari informasi anggaran dan keuangan lalu mendiskusikannya

bersama tim fraksi dan tim bagian anggaran yang lain jika ada informasi yang ragu atau kurang saya pahami.”

Anggota DPRD juga mengakui bahwa informasi anggaran dan keuangan ini sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam debat parlemen, hal ini dikarenakan dalam perdebatan tersebut akan membahas isi dari informasi anggaran dan keuangan secara keseluruhan dan semua anggota DPRD akan memberikan pandangan umum mengenai rancangan anggaran. Debat dalam pembahasan ini sering terjadi karena anggota DPRD ini memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berbeda dalam membaca dan memahami informasi anggaran dan keuangan yang tersedia.

“tentunya sering ya, karena dalam debat anggaran yang dihadiri oleh semua bagian anggaran dan semua anggota dewan bahkan dihadiri oleh bapak bupati, tentunya informasi anggaran ini sering digunakan dan sangat sangat dibutuhkan.”

“sering, karena disaat debat anggaran semua fraksi akan memberikan pandangan umumnya mengenai rancangan anggaran dan nantinya akan ditanggapi oleh semua anggota dewan dihadapan bupati. Dan informasi anggaran dan keuangan ini yang menimbulkan perdebatan, karena biasanya setiap anggota DPRD menangkap informasi yang tidak sama dalam laporan informasi anggaran dan keuangan tersebut.”

### **Penggunaan perantara atau tenaga ahli untuk mendapatkan informasi anggaran dan keuangan dalam mendukung aktivitas anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Agam**

Anggota DPRD Kabupaten Agam dalam menggunakan informasi anggaran dan keuangan memiliki peran perantara dan TA bagi anggota parlemen. Beberapa anggota parlemen, yang kurang memiliki pengetahuan teknis tentang masalah keuangan dan akuntansi, hanya menggunakan informasi yang disiapkan oleh badan-badan kelembagaan, seperti sekretariat DPRD yang menyiapkan rancangan anggaran dan keuangan dan tim fraksi yang membantu anggota DPRD dalam memahami informasi anggaran dan keuangan yang tidak dipahami oleh anggota DPRD tersebut, mengingat bahwa anggota DPRD Kabupaten Agama sebagian besar bukan lulusan dari akuntansi maupun ekonomi, bahkan ada yang lulusan SMA.

“anggaran dan keuangan disiapkan oleh sekretarian dprd kab agam, jadi kami bagian anggaran hanya menerima file yang telah jadi yang berisi rancangan anggaran dan keuangan yang dibutuhkan. Setelah kami melihat isi dari rancangan anggaran dan keuangan tersebut lalu kami berdiskusi dalam rapat anggaran mengenai anggaran yang telah dibuat, awalnya kami harus memastikan semua anggaran dan keuangan harus sesuai dengan peraturan, tetapi kalau ditanya saya dibantu oleh tenaga ahli jawaban saya pribadi iya, seperti yang kita bicarakan diawal tadi saat perkenalan bahwa saya sendiri hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) jadi ada hal hal yang saya kurang mengerti maka saya dibantu oleh tenaga ahli fraksi partai saya”

“rancangan anggaran dan keuangan ini kan disiapkan oleh sekretariat dprd bagian keuangan, maka tentu saja itu bisa disebut dengan tim ahli, tapi tim ahli pas diskusi atau rapat anggaran dan keuangan itu tidak ada, khusus dewan saja, atau mungkin sebelum rapat diadakan bapak ibuk dewan ada yang berdiskusi dengan tim fraksi nya terlebih dahulu bisa saja ya”

Anggota parlemen menjelaskan bahwa dalam memahami dan menggunakan informasi anggaran dan keuangan sangat perlu dan penting perantara dan tenaga ahli, hal ini dikarenakan anggota DPRD menyadari adanya kompleksitas informasi secara keseluruhan, dan kebutuhan untuk menyederhanakannya, mereka juga menyadari waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi ini dan menganalisisnya untuk parlemen, debat Komite dan kelompok kerja, serta dalam kegiatan politik lainnya di luar parlemen sangat rumit, sehingga

sangat diperlukan tenaga ahli atau perantara untuk memahami dan menggunakan informasi anggaran dan keuangan tersebut.

“kalau bagi saya pribadi sangat membantu, mungkin juga akan sangat membantu untuk para anggota dewan bagian anggaran yang lain yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau keuangan, karena bagian anggaran sendiri beragam latar belakang pendidikan bapak dan ibunya tidak semuanya memiliki latar belakang ekonomi dan keuangan yang membuat anggota DPRD kesulitan dalam menggunakan dan memahami informasi anggaran dan keuangan tersebut”

### **Dampak menggunakan perantara atau tenaga ahli dalam penggunaan informasi anggaran dan keuangan bagi anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Agam.**

Anggota parlemen menjelaskan bahwa dalam memahami dan menggunakan informasi anggaran dan keuangan perantara dan tenaga ahli memiliki dampak yang sangat baik. Perantara dan tenaga ahli memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anggota DPRD untuk memahami dan menggunakan laporan informasi anggaran dan keuangan.

Banyaknya keterbatasan anggota DPRD dalam menghadapi informasi anggaran dan keuangan seperti anggota DPRD yang sebagian besar tidak berasal dari lulusan ekonomi atau akuntansi yang membuat anggota DPRD tidak memiliki ilmu yang cukup dalam menganalisa informasi anggaran dan keuangan tersebut, serta banyaknya anggota DPRD yang sudah memiliki usia lanjut membuat anggota DPRD tersebut susah untuk belajar atau memahami informasi anggaran dan keuangan tersebut dan kurangnya waktu yang dimiliki anggota DPRD tersebut.

“menurut saya iya, karena adanya keterbatasan waktu.”

“kalau menurut saya, tentu iya sangat membantu, mereka menyiapkan semua rancangan anggaran yang dibutuhkan kami dewan Cuma mengecek kembali lalu menyetujui nya.”

“iya, ini saja orang-orang sekretariat sangat membantu apalagi ada tim ahli khusus yang bisa menerangkan dan menjelaskan pada saat rapat dihadapan semua dewan dan opd, tetapi saat ini masih dibantu fraksi masing-masing untuk mempersiapkan rapat, tapi yang diharapkan memang orang yang benar-benar mengetahui akuntansi”

“sangat membantu jika memang ada tim ahli yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi maupun keuangan pada saat pembahasan anggaran hal itu akan sangat berdampak untuk pembahasan yang lebih matang dan lebih mendalam”

“sangat membantu, sebenarnya adanya tim ahli pada saat melakukan pembahasan anggaran ini sangat perlu, tetapi belum ada tim ahlinya. Mengingat kita anggota dewan bagian anggaran tidak memiliki pendidikan yang sama atau tidak memiliki pendidikan akuntansi atau keuangan mungkin memang ada beberapa yang kesulitan mendapatkan informasi dari anggaran tetapi setidaknya kalau sudah diamanahkan kepada kita dan intinya mau belajar untuk memahaminya, tapi ada yang membantu mungkin dari fraksi mereka masing-masing”.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan implementasi dan efektivitas pelaksanaan e-budgeting di Kabupaten Agam, diperoleh kesimpulan bahwa: Anggota parlemen menggunakan informasi anggaran dan keuangan yang ada, namun tidak semua anggota parlemen memahami isi dari laporan informasi anggaran dan keuangan. Anggota DPRD Kabupaten Agam menggunakan semua informasi yang mengenai anggaran dan keuangan, namun anggota parlemen dalam penggunaan informasi anggaran keuangan

tidak dilihat secara detail, dengan kata lain anggota DPRD tidak melihat semua informasi anggaran dan keuangan yang ada dalam laporan, tapi mereka hanya melihat hasil akhir dari informasi anggaran dan keuangan tersebut. Hal ini dilakukan oleh anggota DPRD karena mereka tidak memiliki waktu yang banyak dalam membaca dan memahami informasi anggaran dan keuangan tersebut ditambah lagi mereka memiliki pekerjaan dan kegiatan lain.

Anggota DPRD Kabupaten Agam dalam menggunakan informasi anggaran dan keuangan memiliki peran perantara dan TA bagi anggota parlemen. Beberapa anggota parlemen, yang kurang memiliki pengetahuan teknis tentang masalah keuangan dan akuntansi, hanya menggunakan informasi yang disiapkan oleh badan-badan kelembagaan, seperti sekretariat DPRD yang menyiapkan rancangan anggaran dan keuangan dan tim fraksi yang membantu anggota DPRD dalam memahami informasi anggaran dan keuangan yang tidak dipahami oleh anggota DPRD tersebut, mengingat bahwa anggota DPRD Kabupaten Agama sebagian besar bukan lulusan dari akuntansi maupun ekonomi, bahkan ada yang lulusan SMA.

Anggota parlemen dalam memahami dan menggunakan informasi anggaran dan keuangan perantara dan tenaga ahli memiliki dampak yang sangat baik. Perantara dan tenaga ahli memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anggota DPRD untuk memahami dan menggunakan laporan informasi anggaran dan keuangan.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan, dimana penelitian ini hanya memiliki 12 informan. Kurang luasnya informan yang digunakan. Seharusnya menambahkan informan untuk memperdalam dan memperluas informasi.

### **Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan keterbatasan yang ada, peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah informan sehingga bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi. Dengan adanya informan yang lebih banyak membuat penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pembahasan lebih detail lagi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M. (2014). *Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, M. A. (2019). Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Government Governance. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 13(4).
- Arikunto, S. (2011). *Penelitian Tindakan Kelas* (B. Aksara, ed.). Jakarta.
- Armando, G. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- BAENE, E., & WARUWU, N. A. (2019). Mekanisme penyusunan anggaran penerimaan dan belanja pada kantor camat sawo KABUPATEN NIAS UTARA. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen PEMBNAS (JAM PEMBNAS)*, 6(1), 12–18.
- Basri, R. (2012). Analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Coryanata, I. (2011). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(2), 110–125.

- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi*, 3(1), 64–75.
- Fauzan, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gunawan, A., & Ishak, J. F. (2021). Model Anggaran Perusahaan berbasis Laporan Keuangan. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 386–395.
- Haryati, D. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Kajian*, 15(3), 523–550.
- Hasyim, M. (2021). Prinsip Otonomi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 95–106.
- Heald, D., & Hodges, R. (2020). The accounting, budgeting and fiscal impact of COVID- 19 on the United Kingdom. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 785–795.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 20, 1–26.
- Intaniasari, A. D., & Prasetyowati, R. A. (2017). Mekanisme Penyusunan Anggaran Pada Direktorat Perencanaan Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Jakarta Pusat. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 5(2).
- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 743–770.
- Jatmiko Wahyu Prabowo, T., Leung, P., & Guthrie, J. (2017). Reforms in public sector accounting and budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in implementation. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 29(1), 104–137.
- K, A. (2013). *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Luqman Al-Hakim Press.
- Kartiwa, H. A. (2006). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “Good Governance.” Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia.
- Kelly, J. M. (2003). The long view: Lasting (and fleeting) reforms in public budgeting in the twentieth century. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Kema, I. (2013). Penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah kota manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Masruri, F. A. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. *Sintesa Stie Sebelas April Sumedang*, 10(1), 105–115.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Menejemen Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Pematang. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).
- Saleh, H. A. (2016). Kajian tentang pemerintahan desa perspektif otonomi daerah. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(1), 1–24.
- Sande, P. (2013). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).

- Sanjaya, W. (2011). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 604–620.
- Satria, D. I., & Bobby, M. A. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 73–86.
- Savitri, E., & Sawitri, E. (2014). Pengaruh partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan informasi asimetri terhadap timbulnya kesenjangan anggaran. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 210–226.
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28.
- Setiawan, D., & Soleh, W. K. (2021). Pengaruh Penyusunan Anggaran Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Kinerja Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bkpsdm) Kabupaten Bandung. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(1), 148–161.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, Y., Antikowati, A., & Indrayati, R. (2014). Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Lentera Hukum*, 1(1), 1–12.
- Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2013). Standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 29–45.
- Utami, K., & Syofyan, E. (2013). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. *Wahana Riset Akuntansi*, 1(1), 63–86.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1).
- Zeyn, E. (2014). Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan. *Trikonomika Journal*, 10(1), 52–62.
- Zuriah, N. (2010). *Metodologi penelitian sosial&pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara